ADMINISTRATIO
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
p-ISSN: 20870825 e-ISSN: 25486977
Volume 11 Nomor 1 Tahun 2020

MEMBACA ASPEK KOMUNIKASI, SUMBERDAYA, DISPOSISI, DAN STRUKTUR BIROKRASI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA DINAS SOSIAL KABUPATEN CILACAP

Nurlaela Adiwinarni[1], **Dyah Retna Puspita**[2], **Slamet Rosyadi**[2]
[1]Magister Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
[2]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
E-mail: n.adiwinarni@gmail.com

Abstrak
Tahapan penting proses kebijakan publik adalah implementasi kebijakan yang akan menetukan suatu proses, dimana tujuan dan dampak kebijakan akan dihasilkan. Beberapa faktor yang penting bagi keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi serta struktur birokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi baik secara mandiri maupun bersama sama terhadap keberhasilan implementasi program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Metode penelitian yang digunakan bersifat analisis kuantitatif, data yang diperoleh berdasarkan jawaban kuesioner dianalisis dengan statistik regresi regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara mandiri hanya variable Komunikasi (X1) dan Struktur Birokrasi (X4) yang mampu berpengaruh signifikan terhadap implementasi program P2K2. Namun secara bersama-sama Komunikasi (X1), Sumberdaya (X2), Disposisi (X3) dan Struktur Birokrasi (X4) mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sebesar 76,5%, sedangkan 23,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang belum kami teliti.

Kata kunci: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi, Implementasi

Abstract
An important stage in the public policy process is the implementation of policies which will determine a process, where the objectives and impact of the policy will be generated. Some factors that are important for successful implementation are communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The purpose of this study was to determine the magnitude of the influence of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure both independently and jointly on the successful implementation of the Cilacap Regency Social Service Family Capacity Building Meeting program. The research method used is quantitative analysis, the data obtained based on the answers to the questionnaire were analyzed statistics multiple linear regression. The results showed that independently only the Communication variable (X1) and the Bureaucratic Structure (X4) were able to significantly influence the implementation of the P2K2 program. But together Communication (X1), Resources (X2), Disposition (X3) and Bureaucratic Structure (X4) were able to influence the successful implementation of the P2K2 program of the Social Service Office of Cilacap Regency by 76.5%, while 23.5% were influenced by other variables which we haven't examined.

Keywords: *Communication , Resources, Disposition, Bureaucratic Structure, Implementation*

I. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam kebijakan publik. Tahapan implementasi akan menentukan suatu proses, dimana tujuan dan dampak kebijakan akan dihasilkan. Implementasi kebijakan dapat dilaksanakan jika aturan-aturan hukum yang tertuang dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan-peraturan lain telah ada.

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang sampai dengan hari ini masih terjadi di Indonesia. Hal ini tentunya masih menjadi pekerjaan rumah bagi para pemangku kebijakan untuk dapat menyelesaikan fenomena tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah

Copyright® 2020. Owned by Author(s),
published by Administratio.
This is an open-acces article under CC-BY- SA License

Indonesia adalah dengan meluncurkan sebuah program pengentasan kemiskinan yang dibalut dalam suatu program yaitu Program Keluarga Harapan selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat, selanjutnya disebut KPM (Dinas sosial: 2018)

Program P2K2 adalah program nasional bagian dari Program PKH yang dijalankan Kementerian Sosial diseluruh wilayah Indonesia pada umumnya dan juga diterapkan di Kabupaten Cilacap sejak Januari 2018. Dinas Sosial (2018) menyatakan bahwa implemantasi P2K2 dilakukan setelah KPM menerima bantuan sosialnya, kemudian pelaksanaan P2K2 oleh tenaga pendamping dikecamatan-kecamatan. Tenaga pendamping harus melakukan dalam rencana pelaksanaan kegiatan dan mengisi form yg sudah disediakan dan mengisis daftar hadir serta melampirkan laporan bulanan guna dilaporkan pada Pekerja Sosial Supervisor/Koordinator di tingkat Kabupaten.

Sejalan dengan sujumlah fakta di atas, maka perlu dilaksanakan sebuah kajian penelitian yang mendalam mengenai faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Dinas Sosial Kabupaten Cilacap berdasarkan teori yang diungkapkan oleh George C Edward III.

II. TINJAUAN LITERATUR

Kebijakan Publik

Menurut Eyestone dalam Winarno (2007:17) mengungkapkan bahwa "secara luas" kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai "hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya". Dye dalam Nugroho (2011:94) menjelaskan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan itu, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Dunn (2003:109) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.

Dari beberapa definisi dan pemahaman di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah dan stakeholder yang menyangkut segala urusan publik untuk menyelesaikan suatu permasalahan publik, dan prosesnya berjalan dengan cara yang sistematis.

Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2011:432) implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Menurut Indiahono (2009:143) implementasi kebijakan adalah aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan itu sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor dan kelompok sasaran.

Dari pendapat ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi adalah aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya. Dalam penelitian ini model implementasi kebijakan yang akan digunakan adalah model implementasi yang diungkapkan oleh Edward III, implementasi dipengaruhi oleh empat variabel yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif dilanjutkan explanatory research. Penelitian survey yaitu penelitian yang menggunakan sampel dari suatu populasi dan mengunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data (Singarimbun, Masri dan Effendi, 2006:3). Metode *survey* dipilih dengan mempertimbangkan jumlah populasi yang cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah yang berbeda dengan harapan hasil penelitian lebih andal.

Tabel 1. Matrik Definisi Operasional

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR
Keberhasilan Implementasi (Y)	Efektivitas	1. Tujuan Program 2. Strategi pencapaian tujuan program
	Responsivitas	1. Program dilaksanakan secara tepat 2. Program dilaksanakan secara cermat
	Akuntabilitas	1. Adanya kepatuhan terhadap prosedur program 2. Adanya pertanggungjawaban program yang telah dilaksanakan
	Adil	1. Peserta program mendapatkan perlakuan yang sama 2. Peserta program dibebaskan dari segala macam iuran dalam bentuk apapun
Komunikasi (X1)	Transmisi	1. Tidak Ada pertentangan pendapat antara pelaksana dan pengambil kebijaksanaan 2. Informasi program disampaikan melalui forum dan media yang tepat
	Kejelasan Pesan	1. Informasi mengenai program disampaikan secara jelas 2. Informasi program mudah dipahami
	Konsistensi	1. Informasi mengenai program disampaikan dengan konsisten 2. Tidak terjadi pertentangan perintah
Sumber Daya (X2)	Staf	1. Tersedianya tenaga pendamping dalam jumlah yang memadai 2. Tersedianya tenaga pendamping yang berkompeten
	Fasilitas	1. Tersedianya sarana pendukung 2. jumlah sarana pendukung mecukupi
	Keuangan	1. Ketersediaan keuangan 2. Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara baik
Kecenderungan/Disposisi (X3)	Komitmen	1. Adanya komitmen yang baik dari pelaksana program 2. Adanya tindakan yang baik terhadap informasi yang baru mengenai program
	Penempatan Staf sesuai dengan keahliannya	1. Penempatan staf sesuai dengan latar belakang pendidikan 2. Adanya diklat yang tepat
	Insentif diberikan sesuai dengan porsinya	1. Peningkatan insentif sesuai dengan beban kerja yang diterima 2. Pengurangan insentif
Struktur Birokrasi (X4)	Standar pelayanan minimal	1. Meningkatnya kecepatan dalam pelaksanaan program 2. Adanya hubungan baik dengan pihak terkait
	Pendelegasian tugas dan wewenang	3. Adanya kejelasan dalam pendelegasian tugas 4. Adanya kejelasan dalam pendelegasian wewenang

Sumber: Adaptasi dari model Edwards III

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Korelasi Ganda (R)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antar variabel bebas secara bersama sama dengan variabel terikat. Tabel berikut adalah hasil analisis korelasi ganda variabel Komunikasi (X1), Sumberdaya (X2), Disposisi (X3) dan Struktur Birokrasi (X4) dengan Keberhasilan Implementasi Program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap (Y).

Tabel 2. Hasil analisis regresi linear berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.878[a]	.771	.765	1.461

a. Predictors: (Constant), X4Tot, X2Tot, X1Tot, X3Tot

Berdasar tabel 2 di atas diperoleh angka R sebesar 0,878. Hal ini menunjukan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara Komunikasi (X1), Sumberdaya (X2), Disposisi (X3) dan Struktur Birokrasi (X4) terhadap Keberhasilan Impelementasi program P2K2(Y) Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

Analisis Determinasi (R2)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel Komunikasi (X1), Sumberdaya (X2), Disposisi (X3) dan Struktur Birokrasi (X4) secara serentak terhadap Keberhasilan Implementasi program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap (Y).

Tabel 3. Hasil Analisis determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.878[a]	.771	.765	1.461

a. Predictors: (Constant), X4Tot, X2Tot, X1Tot, X3Tot

Berdasarkan tabel 3 di atas diperoleh angka *Adjusted R Square*) sebesar 0,765 atau (76,5%). Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel Komunikasi (X1), Sumberdaya (X2), Disposisi (X3) dan Struktur Birokrasi (X4) terhadap Keberhasilan Impelementasi program P2K2 (Y) sebesar 76,5%. Sedangkan sisanya sebesar 23,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. Hal ini merujuk apa yang diungkapkan oleh Santoso (2001) bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan Adjusted R^2 sebagai koefisien determinasi

Standard Error of the Estimate adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Keberhasilan Impelementasi program P2K2(Y). Dari hasil regresi di dapat nilai 1.461, hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi Keberhasilan Implementasi Program P2K2 sebesar 1.5

Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel Komunikasi (X1), Sumberdaya (X2), Disposisi (X3) dan Struktur Birokrasi (X4) terhadap variabel Keberhasilan Impelementasi program P2K2 (Y). Dari hasil output analisis regresi dapat diketahui nilai F seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1014.966	4	253.741	118.857	.000[b]
	Residual	301.014	141	2.135		
	Total	1315.979	145			

a. Dependent Variable: YTot
b. Predictors: (Constant), X4Tot, X2Tot, X1Tot, X3Tot

Berdasar tabel 4 diatas diperoleh F hitung sebesar 118.857. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, a = 5%, F Tabel = 2.435854. Nilai F hitung > F tabel (118.857> 2.4358), maka Ho ditolak artinya ada pengaruh secara signifikan antara Komunikasi (X1), Sumberdaya (X2), Disposisi (X3) dan Struktur Birokrasi (X4) secara bersama-sama terhadap Keberhasilan Implementasi program P2K2 di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel Komunikasi (X1), Sumberdaya (X2), Disposisi (X3) dan Struktur Birokrasi (X4) terhadap variabel Keberhasilan Impelementasi program P2K2 (Y). Dari hasil analisis regresi output dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.407	1.462		3.014	.003
	X1Tot	.875	.082	.687	10.648	.000
	X2Tot	-.065	.043	-.073	-1.497	.137
	X3Tot	.022	.091	.018	.240	.811
	X4Tot	.511	.138	.258	3.717	.000

a. Dependent Variable: YTot

Tebel 5 di atas menunjukkan bahwa pengujian koefisien regresi secara parsial adalah sebagai berikut:

Variabel Komunikasi (X1)

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar α = 5%, diperoleh t hitung sebesar 10.648 dan t tabel sebesar 1.976. Nilai t hitung > t tabel (10.648 > 1.976) maka H1 **diterima**. Artinya bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan antara komunikasi (X1) dengan keberhasilan implementasi program P2K2 (Y).

Variabel Sumberdaya (X2)

Tingkat signifikansi menggunakan tingkat signifikasi sebesar α = 5%, diperoleh t hitung sebesar -1.497, dan t tabel =1.976, Nilai - t hitung > - t tabel (-1.497> - 1.976) maka H1 **ditolak**. Artinya bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara Sumberdaya (X2) dengan Keberhasilan Implementasi program P2K2 (Y).

Variabel Disposisi (X3)

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar α = 5%, diperoleh t hitung sebesar 0.240 dengan t tabel sebesar 1.976. Nilai t hitung < t tabel (0.240 <1.976) maka H3 **ditolak**. Artinya bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara Disposisi (X3) dengan keberhasilan implementasi program P2K2 (Y).

Variable Struktur Birokrasi (X4)

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar α = 5%, diperoleh t hitung sebesar 3.717 dan t tabel sebesar 1.976. Nilai t hitung > t tabel (3.717 > 1.976) maka H4 **diterima**. Artinya bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan antara Struktur Birokrasi (X4) dengan keberhasilan implementasi program P2K2(Y).

Berdasarkan Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t), faktor yang paling dominan dan signifikan dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi Program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap (Y) adalah variabel Komunikasi (X1), dan Struktur Birokrasi (X4).

PEMBAHASAN

Implementasi merupakan tahapan paling krusial dalam kebijakan karena dalam proses implementasi berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan. Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang (Nugroho, 2011).

Salah satu ahli yang mengemukakan tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Rumusan masalah tersebut adalah seberapa besar pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap keberhasilan implementasi program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap?

Pengaruh Komunikasi terhadap Keberhasilan Implementasi Program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

Hasil pengujian terhadap variabel komunikasi memberikan gambaran bahwa variabel komunikasi berpengaruh positif yang sangat kuat dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi Program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditunjukkannya pengaruh positif dan signifikan, dimana nilai t hitung = 10.648 dan *P*= 0,000 (*P* < 0,05). Karena nilai probabilitasnya (0,00 < 0,05) maka Ho ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi secara mandiri mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sebesar 58.7%.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2015) bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan. Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi adalah elemen penting dari implementasi kebijakan, sebab komunikasi yang baik menjadikan kebijakan dapat tersosialisasi dan terlaksana dengan baik. Melalui komunikasi, perintah untuk menerapkan kebijakan ditransmisikan kepersonel yang tepat dengan cara yang jelas dan pesan tersebut harus akurat dan konsisten.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ariyani, Hakim, Noor (2014) yang menunjukkan adanya hubungan yang positif antara komunikasi dengan keberhasilan implementasi program. Lebih lanjut hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Edward III (1980) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksana kebijakan mengatahui apa yang harus dilakukan agar keputusan-keputusan kebijakan dapat diteruskan kepada orang yang tepat dengan cara komunikasi yang akurat dan dimengerti secara cermat oleh pelaksana.

Pengaruh Sumberdaya terhadap Keberhasilan Implementasi Program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

Hasil pengujian terhadap variabel sumberdaya memberikan gambaran bahwa perhitungan persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel sumberdaya tidak berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Program P2K2. Karena diperoleh t hitung sebesar -1.497, dan t tabel =1.976 sehingga H2 ditolak.

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan pada penelitian yang dilaksanakan oleh Khasanah Nur, dkk (2018), yang menyatakan bahwa sumber daya memiliki pengaruh yang lemah dan tidak signifikan terhadap implementasi kebijakan PKH. Artinya faktor yang menurut Edward III merupakan hal penting dalam keberhasilan implemantasi program, namun dalam **ranah senyatanya** sumber daya manusia, finansial, waktu, dan sarana

prasarana menjadi hal yang tidak berpengaruh jika sasaran program telah menerima bantuan berupa dana yang sudah dijanjikan dalam program kebijakannya pemerintah.

Pengaruh Disposisi terhadap Keberhasilan Implementasi Program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

Hasil pengujian terhadap variabel disposisi memberikan gambaran bahwa perhitungan persamaan regresi linier berganda menunjukan bahwa disposisi secara mandiri sangat lemah dan menjadi tidak signifikan dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi Program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Karena diperoleh t hitung sebesar 0.240 dengan t tabel sebesar 1.976. Nilai t hitung < t tabel (0.240 < 1.976) maka H3 ditolak.

Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilaksanakan oleh Ratri (2014) yang menyatakan bahwa dimensi disposisi tidak hanya soal komitmen dan respon pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, namun juga adanya perhatian dari aktor atau pemberi kebijakan berupa pemberian insentif atau *reward* bagi pelaksana kebijakan yang berprestasi. Artinya bahwa penghargaan dari aktor kebijakan atau instansi setempat bisa memberikan semangat bagi para pelaksana kebijakan untuk bisa berkomiten dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program P2K2 sehingga tujuan dari progam P2K2 bisa segera tercapai.

Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Keberhasilan Implementasi Program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

Hasil pengujian terhadap variabel struktur birokrasi memberikan gambaran bahwa perhitungan persamaan regresi linier berganda dapat diinterpretasikan bahwa variabel struktur birokrasi berpengaruh positif yang kuat dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi Program P2K2) Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditunjukkannya pengaruh positif dan signifikan, dimana nilai t= 13,346 dan *P*= 0,000 (*P* < 0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi secara mandiri mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Karena nilai probabilitasnya (0,00 < 0,05) maka Ho ditolak dan H1 diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Edward III (1980) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan juga akan berjalan dengan efektif apabila terdapat struktur birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan dimana di dalamnya terdapat dua aspek utama yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ariyani, Hakim, Noor (2014) bahwa struktur birokrasi berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur birokrasi adalah elemen penting dari implementasi kebijakan, sebab struktur birokrasi yang baik menjadikan kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Shobry (2017) yang menunjukkan adanya hubungan yang positif antara struktur birokrasi dengan keberhasilan implementasi program.

Pengaruh Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi terhadap Keberhasilan Implementasi Program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

Hasil pengujian terhadap variabel bebas memberikan gambaran bahwa perhitungan persamaan regresi linier berganda adalah Y= 4,407 +0,875 (X1) - 0,065 (X2) + 0,022 (X3) + 0,511 (X4), dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel komunikasi, sumber daya, Disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sebesar 76. 5%. Dengan demikian dari keempat variabel tersebut, variabel komunikasi memberikan pengaruh pada taraf yang sangat kuat terhadap variabel keberhasilan implementasi kebijakan P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

Variabel lain yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap adalah struktur birokrasi. Variabel struktur birokrasi memberikan pengaruh pada taraf yang kuat terhadap variabel keberhasilan implementasi kebijakan Program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Jika variabel struktur birokrasi mengalami kenaikan sebesar satu persen, pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap adalah struktur birokrasi. sebesar 0,511 persen. Akan tetapi, apabila berdasarkan perhitungan uji regresi berganda, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan dari Ariyani, Hakim, Noor, dimana hanya variabel komunikasi dan struktur birokrasi yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Hal ini terlihat dari adanya variabel sumberdaya dan disposisi yang nilai koefisien regresi bernilai negatif dan lebih rendah dari koefisien signifikasi $\alpha = 0.05$

Temuan dalam penelitian ini memberikan gambaran yang berbeda dengan apa yang telah diungkapkan oleh Edward III bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Seperti yang diuangkapkan oleh Khasanah Nur, dkk (2018), yang menyatakan bahwa sumber daya memiliki pengaruh yang lemah dan tidak signifikan terhadap implementasi kebijakan PKH. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam populasi sampel penelitian ini Sumberdaya bukan elemen penting dari implementasi P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh Ratri (2014) yang menyatakan bahwa dimensi disposisi tidak hanya soal komitmen dan respon pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, namun juga adanya perhatian dari aktor atau pemberi kebijakan berupa pemberian insentif atau *reward* bagi pelaksana kebijakan yang berprestasi. Hal ini memberikan gambaran bahwa penghargaan dari aktor kebijakan atau instansi setempat bisa memberikan semangat bagi para pelaksana kebijakan untuk bisa berkomiten dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program P2K2 sehingga tujuan dari progam P2K2 bisa segera tercapai.

Dalam penelitian ini hanya faktor komunikasi dan struktur birokrasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkap oleh rahmat (2015) bahwa komunikasi adalah elemen penting dari implementasi kebijakan yang meliputi transmisi, kejelasan pesan dan konsistensi.

V. PENUTUP

Simpulan

Kesimpulan yang didapat berdasarkan penelitian ialah:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Komunikasi dengan keberhasilan implementasi program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dengan arah positif. Hal ini berarti semakin baik komunikasi maka semakin berhasil implementasi Program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

2. Tidak terdapat pengaruh antara Sumberdaya dengan keberhasilan implementasi P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

3. Tidak terdapat pengaruh antara Disposisi dengan Keberhasilan Implementasi program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara struktur birokrasi dengan keberhasilan implementasi program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Cilacap dengan arah positif. Hal ini berarti semakin baik struktur birokrasi maka semakin berhasil implementasi P2K2 Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

5. Secara bersama-sama variabel Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur birokrasi berpengaruh terhadap Keberhasilan implementasi program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terselesaikan, sehingga peneliti perlu untuk memberikan beberapa antara lain:

1. Variabel Komunikasi (Transmisi, Kejelasan Pesan, dan Konsistensi) memiliki pengaruh paling besar baik secara mandiri maupun simultan dengan kategori sangat kuat, namun begitu pengaruhnya belum maksimal sehingga masih perlu diperhatikan. Upaya peningkatan itu dilaksanakan dengan beberapa strategi diantaranya dengan menyampaikan aturan-aturan terbaru tentang program P2K2, memastikan bahwa KPM paham P2K2, dan menggunakan berbagai media yang efektif dan efisien yang terdapat di desa sebagai contohnya adalah web yang dimiliki oleh desa.

2. Dalam penelitian ini Variabel Sumberdaya memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan dalam keberhasilan implementasi program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Untuk itu sangat perlu ditingkatkan melalui beberapa strategi seperti meningkatkan sarana dan prasarana pendukung program P2K2, menjaga ketersediaan keuangannya serta melaksanakan pengelolaan keuangan dengan transparan.

3. Variabel Disposisi yang sedikit memiliki pengaruh kearah positif namun tidak signifikan. Pengaruhnya masih dibawah variabel struktur birokrasi juga memerlukan peningkatan melalui beberapa upaya seperti peningkatan kompetensi pendamping program P2K2 dengan pelaksanaan diklat yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan memberikan tambahan insentif atau *reward* sebagai penghargaan terhadap kinerja pendamping.

4. Variabel Struktur Birokrasi memiliki pengaruh terbesar kedua setelah variabel komunikasi. Variabel struktur birokrasi memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan. Akan tetapi pengaruhnya belum optimal sehingga masih perlu diperhatikan. Upaya yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi adalah dengan

melaksanakan koordinasi yang intens dan berkelanjutan antara pimpinan dan anggota pendamping program P2K2 dengan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap, agar pelaksanaan program tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya

5. Dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa hanya Faktor komunikasi dan struktur birokrasi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Kedepan diharapkan lebih ditingkatkan lagi untuk variabel yang lain sebagaimana saran diatas. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh Variabel Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi menyumbang sebesar 76.5% untuk keberhasilan implementasi P2K2 sedangkan 23,5 % dipengaruhi oleh variabel yang belum kami teliti, untuk itu sangat diperlukan penelitian lebih lanjut di model penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys*. Gava Media: Yogyakarta

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan,* Edisi Ketiga (Revisi). Jakarta: PT Elek Media Komputindo.

Singarimbun, Masri, dan dofyan Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

Jurnal :

Ariyani, Dini, Abdul Hakim, dan Irwan Noor. (2014). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana, Dan Struktur Birokrasi Terhadap Output Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Probolinggo. *J-PAL*. 5 (2), 15-21.

Faedlulloh, Dodi. (2016). Implementasi Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di Kabupaten Banyumas: Studi Transisi Pasca Regulasi Yang Inkonstitusional. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, *2*(2).

Nur Khasanah, dkk. (2018). Pengaruh Sumber Daya Dan Disposisi Pelaksana Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN).* 2 (2)

Rahmat, Afifa Aisha. (2015). Policy Implementation: Process and Problems. International *Journal of Social Science and Humanities Research*. 3, 306-311.

Ratri, Dewi Kartika. (2014). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan UB.*

Shobry, Muhammad Nuri. 2017. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. 5 (2), 1-13.

Lainnya:

Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. 2018. Gambaran Umum
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2k2). Tidak diterbitkan. Cilacap: Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.